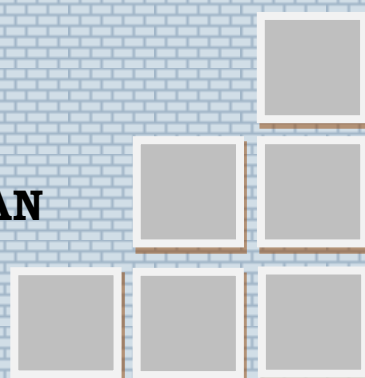




**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
2025-2029**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Tahun 2025**



## **KATA PENGANTAR**

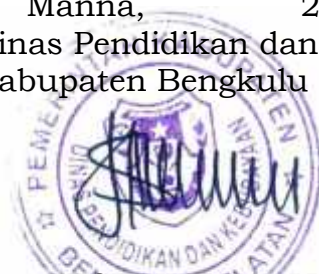
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2025-2029, RPJMD 2025-2029, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2029, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Manna, 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**LUSI WIJAYA, M.Pd**

NIP. 197403252005011001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL</b> .....	I
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	II
<b>DAFTAR ISI</b> .....	III
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	V
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	VI
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	14
2.2. Sumber Daya PD .....	30
2.3. Kinerja Pelayanan PD .....	34
2.4. Kelompok Sasaran layanan PD .....	40
2.5. Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan .....	41
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis PD .....	42
<b>BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	51
3.1. Tujuan Renstra PD Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 .....	51
3.2. Sasaran Renstra PD Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 .....	52
3.3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	56
3.4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	62
<b>BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	65
4.1. Uraian Program .....	65
4.2. Uraian Kegiatan .....	67
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .....	69

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah .....	111
4.5. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 melalui IKU PD .....	114
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD Tahun 2025-2029 melalui IKK.....	118
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	121
5.1. Kesimpulan Substansi .....	121
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	122
5.3. Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan .....	123
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 SK Penetapan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	30
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana .....	31
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	32
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	35
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	38
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Layanan .....	46
Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....	49
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran dan Renstra PD .....	55
Tabel 3.4 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	59
Tabel 3.5 Penahapan Renstra PD .....	61
Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .....	63
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .....	70
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	79
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	111
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD .....	116
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci .....	119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	29
Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pendidikan.....	53
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	54
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .....	65

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah **“mencerdaskan kehidupan bangsa”**. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program- program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2029. Berikut adalah gambar alur perencanaan pembangunan daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Perundang- Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
14. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuoaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);

33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031;
38. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
41. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 90.a Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 – 2029 ini adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
2. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu lima tahun;
5. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

## **1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra Perangkat Daerah, Urgensi atau pentingnya Renstra Perangkat Daerah, Substansi dan muatan Renstra Perangkat Daerah; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga Perangkat Daerah.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra Perangkat Daerah, diuraikan dalam bentuk paragraf.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).

### **2.2. Sumber Daya PD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3. Kinerja Pelayanan PD**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

#### 2.5. Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan

Memuat penjelasan tentang menjalin kemitraan dengan satuan pendidikan, instansi pemerintah terkait, lembaga pendidikan nonformal, organisasi profesi, komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.

#### 2.6. Permasalahan dan Isu Strategis PD

Memuat penjelasan tentang permasalahan layanan pendidikan masih meliputi keterbatasan akses, ketimpangan pemerataan pendidik, mutu layanan pendidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat.

### **BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### 3.1. Tujuan Renstra PD Kab.Bengkulu Selatan

Tahun 2025-2029

Memuat penjelasan tentang arah yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode 2025–2029. Tujuan ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan akses, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.

#### 3.2. Sasaran Renstra PD Kab. Bengkulu Selatan

Tahun 2025-2029

Memuat penjelasan tentang kondisi yang ingin dicapai secara terukur sebagai penjabaran dari tujuan Renstra.

3.3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran  
Renstra PD Tahun 2025-2029

Memuat penjelasan tentang upaya dan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

3.4. Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan  
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Memuat penjelasan tentang pedoman pelaksanaan strategi yang menjadi dasar perumusan program dan kegiatan.

**BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Uraian Program

Memuat penjelasan mengenai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra.

4.2. Uraian Kegiatan

Memuat penjelasan tentang rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator,  
Target dan Pagu Indikatif

Memuat penjelasan rinci mengenai subkegiatan yang dilaksanakan, termasuk kinerja yang diharapkan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif selama periode Renstra.

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung  
program prioritas pembangunan daerah

Memuat penjelasan tentang subkegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.5. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas  
Pendidikan Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Memuat penjelasan tentang keterkaitan antara tujuan dan sasaran Renstra dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan PD Tahun 2025-2029 melalui IKK

Memuat penjelasan tentang target kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB 5 PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan Substansi

Memuat penjelasan tentang ringkasan keseluruhan isi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, yang mencakup kondisi pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran.

#### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Memuat penjelasan tentang prinsip dan pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Renstra, meliputi keterpaduan perencanaan dan penganggaran, sinergi antar pemangku kepentingan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

#### 5.3. Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Memuat penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. guna memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029.

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

###### **a. Tugas Pokok.**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah.

###### **b. Fungsi.**

1. perumusan kebijakan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan pendidikan

- anak usia dini dan pendidikan non formal, sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
  5. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

## **2. Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

### **b. Fungsi.**

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
2. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas.
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

**Fungsi.**

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas
3. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas
4. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas
5. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu suami/istri, kartu pegawai elektronik (KPE), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya
6. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan dinas
7. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas

8. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas
9. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas
10. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas
11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**B. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat meliputi:**

1. Kelompok substansi Perencanaan;
2. Kelompok substansi Keuangan.

**C. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**  
**Tugas Pokok.**

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal

4. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
5. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penelitian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
7. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
8. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**D. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagab dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

2. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
5. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana
6. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

**E. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- 3 penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- 4 penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

- 5 pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidik nonformal; dan
- 6 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

**F. Kepala Bidang Pendidikan Dasar**

**Tugas Pokok.**

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar.

**Fungsi**

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
2. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
3. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar
4. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar
5. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penelitian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
6. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
7. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
8. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar
9. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar

10. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar
12. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

**G. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
3. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
5. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, pembinaan minat bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar

6. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

#### **H. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD**

##### **Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan sekolah dasar.

##### **Fungsi.**

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi ketertiban umum
2. penyusunan pedoman master plan kebijakan ketertiban umum
3. penyusunan rancangan kebijakan lingkup seksi ketertiban umum
4. mengevaluasi program kegiatan operasional lingkup seksi ketertiban umum
5. menyusun petunjuk operasional ketertiban umum
6. mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi perda/perkada
7. melaksanakan pemetaan potensi pelanggaran perda/perkada (non yustisial)
8. melaksanakan penertiban pelanggar perda/perkada (non yustisial)
9. melakukan inventarisasi dan analisa sanksi perda (non yustisial)
10. melaksanakan pengawasan pelanggaran perda (non yustisial)
11. melakukan evaluasi permasalahan pelanggaran penegakan perda/perkada (non yustisial)
12. melakukan penegakkan perda//perkada melalui pemberlakuan sanksi secara non yustisial; dan

13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

**I. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah  
Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
2. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
3. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama
4. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama
5. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penelitian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
6. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
7. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
8. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama

9. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama
10. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama
12. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama
13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

**J. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP**

**Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

**Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama
2. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama
3. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama
5. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana

6. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

#### **K. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP**

##### **Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

##### **Fungsi.**

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
3. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
5. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
6. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **L. Kepala Bidang Kebudayaan**

##### **Tugas Pokok.**

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan.

## **Fungsi.**

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kebudayaan.
2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di bidang kebudayaan.
3. penyusunan bahan prumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan keseniaan.
4. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan keseniaan.
5. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
6. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten.
7. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten.
8. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
9. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten.
10. penusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.
11. penusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten.
12. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten.
13. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

14. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
15. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan kesenian; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

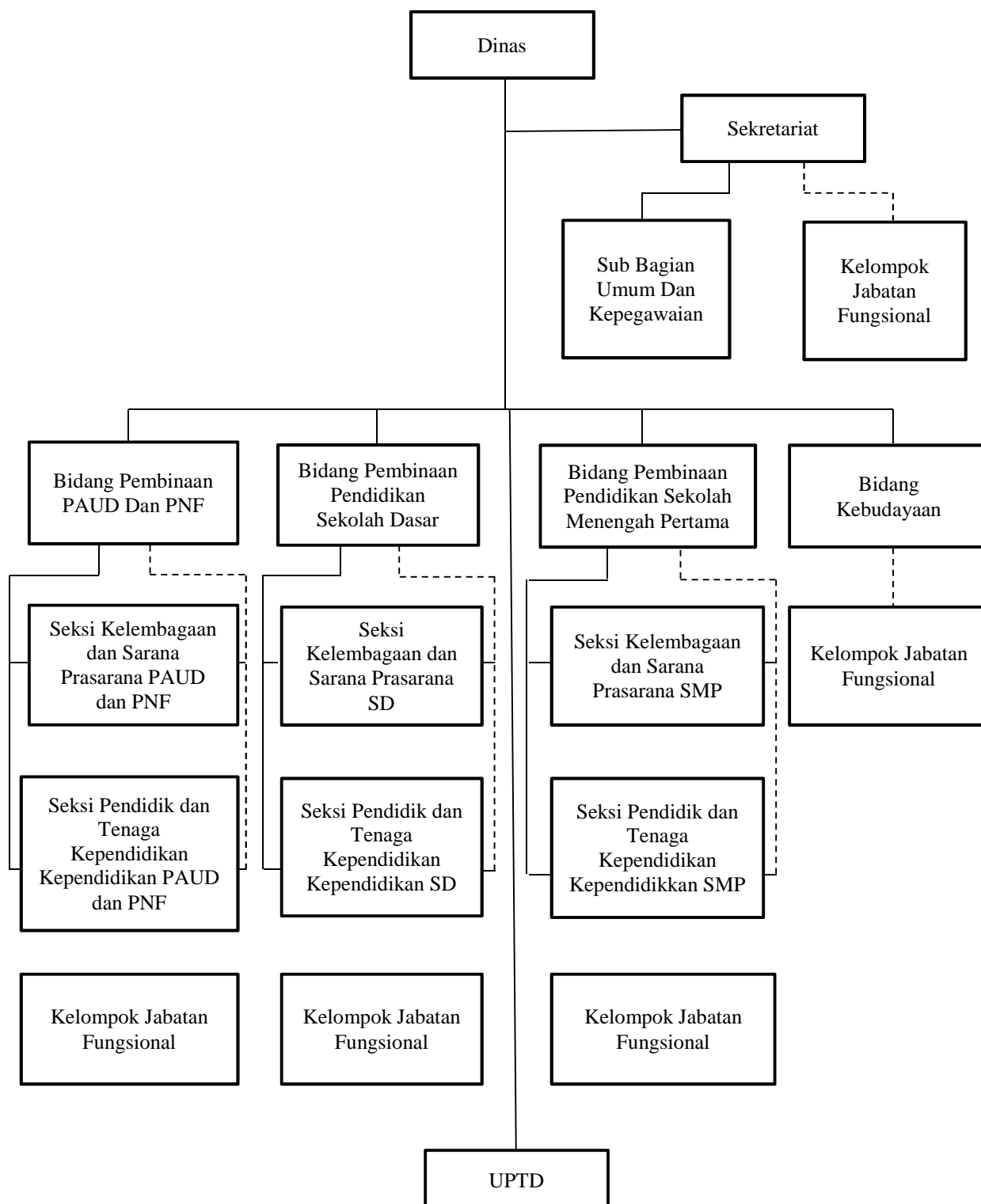
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang tentang susunan organisasi kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional:
    - Kelompok substansi Perencanaan
    - Kelompok substansi Keuangan

3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
  - a. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
  - a. Seksi Cagar Budaya dan Museum
  - b. Pamong Budaya Ahli Muda
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bengkulu Selatan di atas tergambar dibawah ini :

**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki Perangkat Daerah untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

### A. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2025, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, berjumlah 69 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

#### 1. Berdasarkan Pangkat / Golongan

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOLONGAN	JUMLAH	
1	Pembina Utama Muda	IV/C	17	Orang
2	Pembina Tingkat I	IV/B	3	Orang
3	Pembina	IV/A	4	Orang
4	Penata Tingkat I	III/D	25	Orang
5	Penata	III/C	8	Orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	5	Orang
7	Penata Muda	III/A	1	Orang
8	Pengatur Tingkat I	II/D	3	Orang
9	Pengatur	II/C	2	Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	1	Orang
11	Pengatur Muda	II/A		Orang
12	Juru	I/C		Orang
<b>JUMLAH</b>			<b>69</b>	<b>Orang</b>

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 69 orang, dengan komposisi terbesar berada pada Golongan III (39 orang) dan Golongan IV (24 orang).

## 2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**TABEL 2.2**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL & PELAKSANA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	KEPALA DINAS	1	Orang
2	SEKRETARIS	1	Orang
3	KEPALA BIDANG	3	Orang
5	KEPALA SUBAG	1	Orang
6	KEPALA SEKSI	7	Orang
7	JABATAN FUNGSIONAL	4	Orang
8	PENGAWAS	17	Orang
9	PENILIK	3	Orang
10	STAF/PEGAWAI	32	Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>Orang</b>

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan menurut jabatan sebanyak 69 orang yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Kepala Subbag, 7 Kepala Seksi, serta didukung oleh jabatan fungsional, pengawas, penilik, dan pelaksana dengan jumlah terbesar pada staf/pegawai dan pengawas.

### B. ASSET / MODAL

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya uang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini.

**TABEL 2.3**  
**ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
<b>1</b>	<b>Alat-alat angkutan</b>	<b>81 Buah</b>	<b>860,000,000</b>
	- Sepeda Motor	80 Buah	560,000,000
	- Mobil	1 Buah	300,000,000
<b>2</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>294 Buah</b>	<b>411,300,000</b>
	- Mesin Ketik Manual	5 Buah	9,000,000
	- Filling Kabinet	8 Buah	4,000,000
	- Brangkas	1 Buah	2,500,000
	- Lemari Kayu	24 Buah	12,000,000
	- Papan Pengumuman	5 Buah	3,500,000
	- White Board	2 Buah	400,000
	- Meja Biro	6 Buah	5,000,000
	- Meja ½ Biro	22 Buah	11,000,000
	- Kursi Tamu	5 Buah	4,000,000
	- Kursi Putar	18 Buah	13,500,000
	- Meja Komputer	14 Buah	5,600,000
	- Kursi Plastik	50 Buah	4,500,000
	- Jam Dinding	5 Buah	500,000

	- Air Conditioner (AC)	10 Buah	32,000,000
	- Kipas Angin	9 Buah	1,800,000
	- Televisi	6 Buah	11,000,000
	- Sound System	2 Set	4,000,000
	- Infocus	3 Set	20,000,000
	- Wireles	1 Buah	4,000,000
	- Unit Power Supley	8 Buah	8,000,000
	- Stabilisator	6 Buah	3,000,000
	- Gambar Presiden/Wakil Presiden	6 Pasang	3,000,000
	- Dispenser	4 Buah	1,000,000
	- Computer PC	8 Unit	22,000,000
	- Laptop	31 Buah	170,500,000
	- Printer	12 Buah	12,500,000
	- CPU	8 Buah	17,000,000
	- Monitor	8 Buah	8,000,000
	- Meja Rapat Ruangan Kadis	1 Set	6,000,000
	- Meja Tamu	6 Set	12,000,000
<b>3</b>	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>7 Buah</b>	<b>11,400,000</b>
	- Handy Cam	2 Buah	7,000,000
	- Camera Film	4 Buah	4,000,000
	- Pesawat Telepon	1 Buah	400,000
<b>Total</b>		<b>1,282,700,000</b>	

Berdasarkan Tabel 2.3, total nilai aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar

Rp1.282.700.000, yang terdiri dari aset bergerak berupa alat angkutan, peralatan kantor dan rumah tangga, serta alat studio dan komunikasi. Aset didominasi oleh alat angkutan dan peralatan penunjang operasional perkantoran, yang secara umum telah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Ke depan, diperlukan pemeliharaan dan penataan aset secara berkelanjutan agar pemanfaatannya tetap optimal dalam mendukung pencapaian kinerja Renstra Tahun 2025–2029.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bengkulu Selatan periode sebelumnya (2021 – 2026), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2025-2029 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (%)					REALISASI CAPAIAN TAHUN (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lingkungan masyarakat yang unggul dan berbudaya																		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata																		
Persentase angka partisipasi Sekolah PAUD				88	88	89	90	92	72,22	89,04	95,42	95	88,54	82,06	101,18	107,21	105,55	96,23
Persentase angka partisipasi Sekolah SD				94	94	95	96	97	93,64	94,66	96,06	95,31	99,97	99,61	100,70	101,11	99,28	103,06
Persentase angka partisipasi Sekolah SMP				86	86	87	88	89	84,88	99,23	94,59	94,69	99,95	98,69	115,38	108,72	107,60	112,30
Persentase angka partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan				100	100	87,80	100	100	83,74	14,19	10,93	62,80	18,27	83,74	14,19	12,44	62,80	18,27
Persentase Sekolah PAUD Terakreditasi B				62	62	11,67	11,71	11,73	30,00	31,74	50,79	20,96	36,92	48,38	51,19	435,21	178,99	314,74
Persentase Sekolah SD Terakreditasi A				50	50	50	55	55	15,96	15,00	15,00	15,00	15,00	31,92	30,00	30,00	27,27	27,27
Persentase Sekolah SMP				50	50	50	55	55	24,24	29,41	28,57	28,57	28,57	48,48	58,82	57,14	51,94	51,94

Terakreditasi A																		
Persentase kelulusan SD 100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kelulusan SMP 100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nilai Literasi SD			53	53	53,82	54	55		52,33	53,99	60,35	71,87		98,73	100,31	111,75	130,67	
Nilai Numerasi SD			40	40	38	39	40		49,00	41,55	55,96	74,28		122,50	109,34	143,48	185,70	
Nilai Literasi SMP			63	63	60	63	64		56,66	57,75	66,68	67,79		89,93	96,25	105,84	105,92	
Nilai Numerasi SMP			54	54	56	57	58		54,33	36,72	61,09	65,1		100,61	65,57	107,17	112,24	
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat pendidik			75	75	80	85	95	49	75,70	79,40	53,9	53,9	65,33	100,93	99,25	63,41	56,73	
Persentase guru PAUD Formal dengan kualifikasi D4/S1			63	63	81,37	82,86	82,95	91,09	44,24	65,6	80,35	84,15	144,58	70,22	80,61	96,97	101,44	
Persentase iklim keamanan SD			85,07	85,07	67	70	73		59,97	72,31	73,37	76,4		70,49	107,92	104,81	104,65	
Persentase iklim kebhinnekaan SD			87,26	87,26	87,67	92,65	92,75		59,17	67,74	71,01	71,17		67,80	77,26	76,64	76,73	
Persentase iklim inklusivitas SD			76,38	76,38	85,15	90,61	90,75		51,22	59,03	56,21	60,75		67,05	69,32	62,03	66,94	

Persentase iklim keaman SMP				80,21	80,21	85,15	88,14	87,5		65,42	68,75	69,6	70,12		81,56	80,73	78,96	80,13
Persentase iklim kebhinekaan SMP				77,33	77,33	78	80	82		59,15	65,25	71,07	69,18		76,49	83,65	88,83	84,36
Persentase iklim inklusivitas SMP				76,36	76,36	85,15	86,33	87,5		52,82	56,55	56,39	55,6		69,17	66,41	65,31	63,54
Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional				2	2	2	3	4	0	0	0	4	2	0,00	0,00	0,00	133,33	50
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional				56	56	57	58	59	52	52	52	52	5	92,85	92,85	91,22	89,65	8,47

Berdasarkan tabel 2.4, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan hasil yang baik dan cenderung meningkat, di mana sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian angka partisipasi dan kelulusan SD serta SMP berada pada kategori sangat baik, sementara indikator mutu pendidikan seperti literasi, numerasi, dan kompetensi pendidik menunjukkan tren perbaikan meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan pendidikan telah mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata.

**TABEL 2.5**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						393.191.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.670.000	59.420.000		250.400.000	65.120.000		59.320.000		247.200.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	168.536.540	172.030.000	124.252.230	144.360.590	194.392.000	150.260.891	151.820.976	122.580.222	134.112.273	72.660.725		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.437.000	162.864.000	91.513.000	274.447.200	76.280.000	122.405.464	143.045.600	71.518.856	271.529.423	16.102.855		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						196.367.103.270						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						108.639.944						
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.190.466.400	4.058.835.400	4.210.891.900	4.939.792.940	6.500.081.500	4.017.133.000	3.955.566.400	4.158.167.413	4.885.925.077	4.510.625.425		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.514.086.125					32.238.032.164						
Program Pendidikan Non Formal	2.095.831.000	1.286.977.500	1.790.147.200	107.400.230	889.592.700	2.044.368.000	1.281.111.500	1.729.620.994	977.262.539	357.261.000		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.482.000	258.771.000	91.691.000	104.015.330	51.623.000	80.554.376	165.410.472	97.132.100	101.300.540	18.384.000		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan												
Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)												
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya												
Program Pengelolaan Keragaman Budaya												
Program Pengembangan Kebudayaan		150.000.000	358.650.000	386.260.770	2.648.000		145.044.870	270.641.283	373.871.257	2.572.800		
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	47.739.000	50.000.000	20.000.000	21.661.700	83.713.000	44.122.800	49.991.889	19.802.500	21.304.400	16.693.600		

Berdasarkan Tabel 2.5, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2021–2025 secara umum menunjukkan dukungan pendanaan yang memadai terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Realisasi

anggaran pada sebagian besar program berada pada kategori baik dan relatif sejalan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, khususnya pada program layanan pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, serta pengelolaan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat variasi realisasi anggaran antarprogram dan antar tahun yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, dinamika kebutuhan layanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Ke depan, pada periode Renstra 2025–2029 diperlukan penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran agar pemanfaatan pendanaan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi:

1. Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
3. Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.

5. Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

## **2.5 Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam program cek kesehatan gratis serta penyuluhan dan edukasi tentang pola hidup sehat di lingkungan sekolah.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam program pengembangan bakat dan prestasi siswa melalui Cabor (Cabang Olahraga).
3. Perpustakaan, meningkatkan minat baca dan literasi siswa.

## **2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.6.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan**

Dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan dan isu strategis yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Bengkulu Selatan serta Laporan KLHS RPJMD 2025–2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:

#### **1. Masih Terdapatnya Anak Putus Sekolah**

Permasalahan ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia sekolah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung kelangsungan pendidikan anak, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses sarana pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu, kasus-kasus sosial seperti pernikahan dini dan keterlibatan anak dalam dunia kerja turut memperparah tingkat partisipasi sekolah. Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah.

#### **2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan**

Meskipun pemerintah telah menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, pelaksanaannya di Kabupaten Bengkulu Selatan

masih menghadapi berbagai hambatan. Sosialisasi program yang masih terbatas menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan. Selain itu, terbatasnya jumlah dan kapasitas tutor, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya dukungan anggaran dan kemitraan turut menghambat efektivitas penyelenggaraan program ini. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki akses ke jalur pendidikan alternatif, terutama mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

### 3. Ketersediaan Guru yang Kurang Merata

Permasalahan distribusi guru menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan mutu pendidikan. Di beberapa daerah terpencil atau pinggiran, sekolah sering kali kekurangan guru tetap, terutama pada mata pelajaran inti. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem penempatan dan rotasi guru, kurangnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah sulit, serta ketergantungan yang tinggi pada guru honorer tanpa jaminan penempatan jangka panjang. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah, yang pada akhirnya memengaruhi capaian belajar peserta didik dan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah.

### 4. Kualifikasi Pendidikan pada Paud Non Formal Belum S1/DIV

Sebagian besar pendidik Paud Non Formal masih belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta permendikbudristek No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional paud. Banyak dari guru Paud Non Formal tersebut masih berpendidikan SMA/SMK, D1,D2 atau D3, yang belum melanjutkan ke jenjang pendidikan

sarjana. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam perencanaan pembelajaran, stimulasi perkembangan anak, serta pemenuhan standar mutu. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi akademik pendidikan paud menjadi salah satu prioritas, melalui program fasilitas pendidikan lanjut, beasiswa, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi, serta pelatihan berbasis kompetensi untuk mendukung transisi menuju kualifikasi minimal S1/DIV.

5. Rencana dukungan pengatasan kemiskinan terhadap mutu layanan pendidikan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial yang berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ditandai dengan keterbatasan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, meningkatnya risiko anak putus sekolah, serta terbatasnya akses dan kualitas pembelajaran terutama di wilayah perdesaan dan terpencil. Permasalahan ini saling berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kualifikasi pendidik, khususnya pada PAUD dan pendidikan nonformal, sehingga membentuk siklus kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan sektor pendidikan melalui perluasan bantuan pendidikan, peningkatan layanan pendidikan inklusif, serta penguatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik guna meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat lima isu strategis utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu masih tingginya angka anak putus sekolah, belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, belum meratanya distribusi guru, kualifikasi

pendidikan pada Paud Non Formal yang belum S1/DIV serta rencana dukungan pada pengatasan kemiskinan terhadap mutu layanan pendidikan. Kelima permasalahan ini menunjukkan bahwa akses dan pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang menyasar kelompok rentan turut memperparah kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dapat dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LAYANAN**

<b>No</b>	<b>Identifikasi Permasalahan Layanan</b>	<b>Penyebab Layanan</b>
1	Masih terdapatnya anak putus sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan</li> <li>) Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan</li> <li>) Keterbatasan akses di daerah terpencil</li> </ul>
2	Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Minimnya sosialisasi program pendidikan nonformal kepada masyarakat</li> <li>) Terbatasnya sarana dan tenaga pendidik untuk program kesetaraan</li> <li>) Rendahnya partisipasi masyarakat dewasa dalam pendidikan nonformal</li> </ul>
3	Ketersediaan guru yang kurang merata di seluruh wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Penempatan guru yang belum seimbang antar wilayah kota dan desa</li> <li>) Kurangnya insentif bagi guru di daerah terpencil</li> <li>) Ketergantungan pada guru honorer tanpa distribusi yang terencana</li> </ul>

4	Kualifikasi pendidikan pada Paud Non Formal belum S1/DIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Faktor ekonomi banyak guru paud non formal yang belum mampu membiayai pendidikan lanjut</li> <li>) Rendahnya kesadaran akan pentingnya kualifikasi akademik terhadap mutu layanan PAUD.</li> <li>) Terbatasnya program pelatihan dan jalur pengembangan alternative.</li> </ul>
5	Rencana dukungan pengatasan kemiskinan terhadap mutu layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Keterbatasan ekonomi keluarga yang berdampak pada rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan anak.</li> <li>) Keterbatasan akses layanan pendidikan dan bantuan pendidikan di wilayah miskin dan terpencil.</li> <li>) Belum optimalnya integrasi program pengentasan kemiskinan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan.</li> </ul>

Berdasarkan Tabel 2.6, permasalahan utama layanan pendidikan masih berkaitan dengan akses, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan. Masih terdapat anak putus sekolah akibat faktor ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan

akses di daerah terpencil. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum optimal, ketersediaan guru belum merata antarwilayah, kualifikasi pendidik PAUD nonformal masih didominasi oleh tenaga yang belum memenuhi standar akademik dan rencana dukungan pengatasan kemiskinan terhadap mutu layanan pendidikan. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmatif, pemerataan sumber daya pendidik, peningkatan sosialisasi program pendidikan nonformal, serta dukungan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik pada periode Renstra selanjutnya.

### **2.6.2 Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang pendidikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta ketimpangan kualitas layanan antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, maupun dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar setiap anak di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISUU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMP yang tersebar di hampir seluruh kecamatan	Masih terdapatnya anak putus sekolah	Keadilan sosial dan pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang inklusif	Pendidikan inklusif dan akses universal untuk semua anak	Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 10 tahun dan pengurangan ATS	Tingginya angka putus sekolah di wilayah pedesaan dan pinggiran	Peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata
Dukungan program bantuan pendidikan (BOS, PIP, beasiswa daerah) dan regulasi daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.	Akses pendidikan sepanjang hayat bagi semua kalangan	Komitmen global terhadap pendidikan nonformal dan lifelong learning	Penguatan pendidikan kesetaraan melalui PKBM	Masih rendahnya partisipasi warga belajar di program kejar paket A/B/C	
Tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang akademik yang layak	Ketersediaan guru yang kurang merata	Pemerataan layanan dasar dan kualitas pendidikan	Ketimpangan distribusi guru di negara berkembang	Pemerataan guru melalui kebijakan afirmatif seperti PPG dan pemerataan ASN	Kekurangan guru di daerah terpencil atau tidak diminat	
Potensi pemanfaatan teknologi pendidikan (TIK) mulai tumbuh	Kesenjangan akses dan keterampilan penggunaan TIK antara sekolah kota dan desa	Akses terhadap teknologi pembelajaran yang ramah lingkungan	Transformasi digital pendidikan global	Digitalisasi pendidikan melalui platform nasional seperti Rapor Pendidikan	Minimnya infrastruktur TIK di sekolah-sekolah daerah pegunungan dan terpencil	
Partisipasi masyarakat dan komite sekolah cukup tinggi	Rendahnya kualitas pengawasan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan	Peningkatan partisipasi publik dalam good governance pendidikan	Penguatan peran komite sekolah dan transparansi anggaran BOS	Rendahnya literasi masyarakat desa terhadap hak atas pendidikan	

Berdasarkan Tabel 2.7, isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dirumuskan dari keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan layanan, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Isu utama yang mengemuka meliputi peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, penguatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta penguatan partisipasi masyarakat dan tata kelola pendidikan. Isu strategis tersebut menjadi dasar penetapan arah kebijakan dan program prioritas dalam Renstra 2025–2029 guna mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

### **BAB 3**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan sektor pendidikan daerah, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan, seperti belum meratanya akses dan layanan pendidikan, masih tingginya angka putus sekolah, serta ketimpangan mutu antarwilayah. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah-langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat, kebutuhan dunia pendidikan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, bagian ini disusun untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun mendatang.

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan mendukung Visi “Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan desa dan kota yang setara melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

2. Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah.
3. Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut:

**“Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”**

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program, dan inovasi yang terukur.

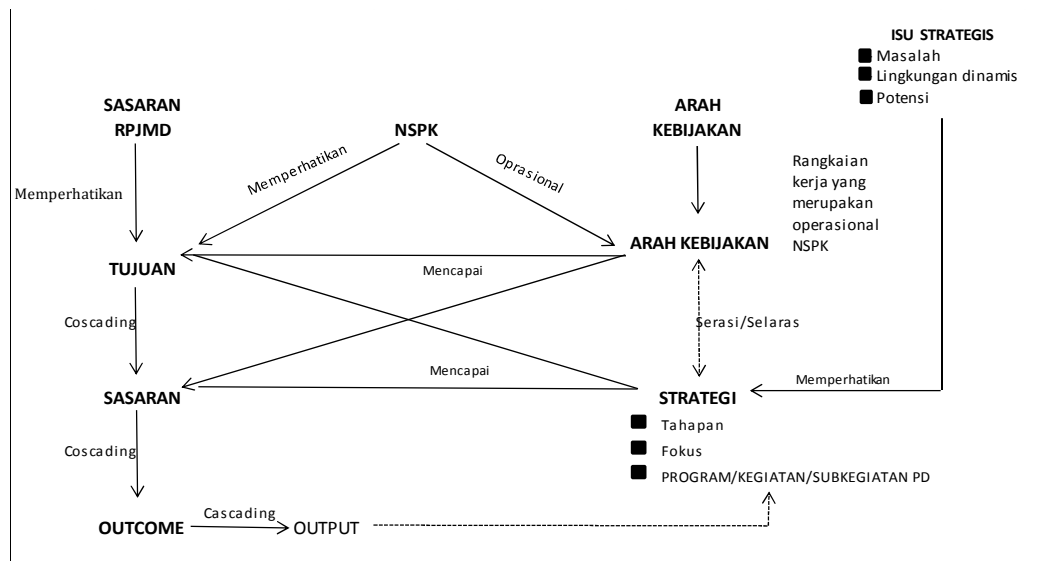
### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, maka secara otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan

dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

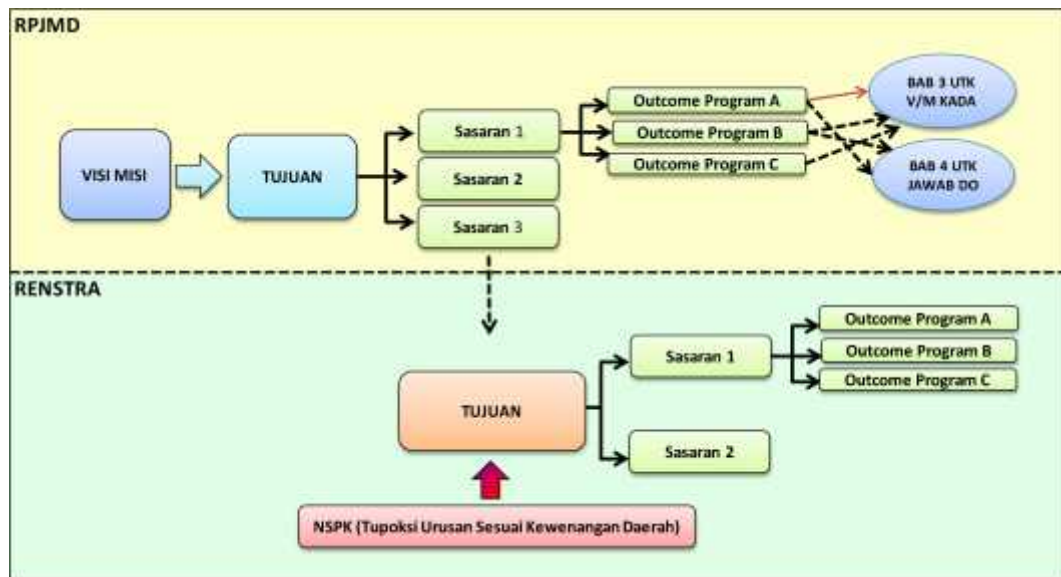
**Gambar 3.1**  
**Konsep Renstra Dinas Pendidikan**



Bagan di atas menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning). Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang

kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

**Gambar 3.2**  
**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra**



Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada kesinambungan tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan. Tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>											
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah dan Terwujudnya kebudayaan maju		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,66	13,90	13,97	14,05	14,07	14,13	14,14	
			Skor Literasi/Numerasi (Skor)	67,75	68,25	69,75	70,75	72,25	74,50	76	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,42	9,60	9,78	9,96	10,14	10,32	10,50	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	36,76	57,56	67,96	58,96	61,76	66,56	70,76	

	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Angka Literasi SD (%)	60,36	71,87	73	75	77	78	80	
		Angka Numerasi SD (%)	55,96	74,28	75	76	78	79	81	
		Angka Literasi SMP (%)	66,68	67,79	68	70	72	74	75	
		Angka Numerasi SMP (%)	61,09	65,10	67	68	71	73	75	
		Iklm Keamanan SD (Nilai)	90,75	91	92,75	93	93,5	94	95	
		Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	90,75	91	92,75	93	93,5	93,75	94	
		Iklm Inklusivitas SD (Nilai)	89,5	90	90,75	91	91,5	92	93	
		Iklm Keamanan SMP (Nilai)	86,5	87	87,5	90	90,5	91	92	
		Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	81	81,5	82	85	87	88	90	
		Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	86	87	87,5	90	91	91,5	92	
	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	300	350	400	450	500	550	600	
		Penetapan Cagar Budaya (Angka)	2	3	3	5	7	9	10	
		Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) (Angka)	1	2	2	5	7	9	10	
		Pengembangan Kesenian Tradisional (Angka)	240	245	250	255	260	265	270	

		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66	68	70	72	73	74	75	
--	--	--	-------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2029 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, dengan tujuan utama mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Target tahunan yang ditetapkan dari 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten untuk HLS dan RLS, serta target APK yang stabil, mencerminkan fokus Dinas Pendidikan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Keterangan tambahan bahwa beberapa indikator merupakan sasaran pemerintah daerah dan sebagian lainnya spesifik menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan memperjelas pembagian peran antarunit pemerintahan. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan strategi perencanaan berbasis indikator yang konkret, selaras dengan norma dan standar pelayanan minimal, serta berorientasi pada peningkatan capaian pembangunan manusia secara terukur.

### **3.3 Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan. Dinas Pendidikan juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pemantauan capaian, serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Strategi ini diperkuat dengan kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan, serta

pelaksanaan program yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029.

Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Adapun strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD**  
**Tahun 2025-2029**

<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN</b>			
<b>KABUPATEN BENGKULU SELATAN</b>			
VISI : Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan MISI : III. Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif. IV. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lingkungan masyarakat yang unggul dan berbudaya	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Ekspansi Akses Pendidikan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan.	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar)
		Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik,

		bahwa anak-anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup.	khususnya bagi masyarakat berpendapatan rentan dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi.	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan.	Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter dan digital literasi`
		Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung kebijakan percepatan wajib belajar.	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah.
		Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan

			Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan akses Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini
			Beasiswa Pendidikan dasar berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Penahapan Renstra PD**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Penguatan akses pendidikan dasar dan menengah	Percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan	Pemerataan kualitas dan distribusi guru	Transformasi digital dalam layanan pendidikan	Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program

Lima tahap strategi pembangunan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Tahap I (2026) dimulai dengan fokus pada penguatan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pemerataan layanan. Dilanjutkan pada Tahap II (2027) dengan

percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan guna memastikan semua kelompok, termasuk yang rentan dan berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang setara. Tahap III (2028) menekankan pemerataan kualitas dan distribusi guru sebagai kunci peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian, Tahap IV (2029) mengusung transformasi digital dalam layanan pendidikan untuk menjawab tantangan era teknologi dan memperluas jangkauan pembelajaran. Akhirnya, Tahap V (2030) diarahkan pada konsolidasi hasil dan keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya. Keseluruhan tahapan ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan.

### **3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis yang menjabarkan rangkaian kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sektor yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing PD, serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan tersebut mengintegrasikan berbagai dimensi layanan pendidikan, mulai dari perluasan akses, peningkatan mutu, penguatan tata kelola, hingga pengembangan karakter peserta didik agar sejalan dengan visi daerah dan strategi prioritas nasional.

**Tabel 3.6**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

<b>NO.</b>	<b>OPERASIONAL NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Percepatan wajib belajar 10 tahun	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar)	Mendorong program wajib belajar 10 tahun dengan memperluas akses PAUD dan meningkatkan capaian angka partisipasi sekolah jenjang SD hingga SMP/ sederajat.	
	Bantuan pembiayaan pendidikan	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rentan dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan melalui pemberian subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan insentif prestasi bagi peserta didik berprestasi.	
	Pemerataan sarpras pendidikan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar yang memenuhi standar	Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional	
	Penyelenggaraan pendidikan inklusif	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, menjamin akses layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.	
	Penguatan kurikulum berbasis karakter dan lokalitas	Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter dan digital literasi	Pengembangan kurikulum lokal adaptif yang menanamkan nilai karakter dan literasi digital	
	Manajemen talenta peserta didik	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Mendorong pembinaan dan pengembangan peserta didik berprestasi melalui manajemen talenta daerah yang sistematis dan berkelanjutan.	
	Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, termasuk pemberian tunjangan tambahan berbasis kinerja.	
	Peningkatan kualitas guru	Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta pemetaan kebutuhan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.	

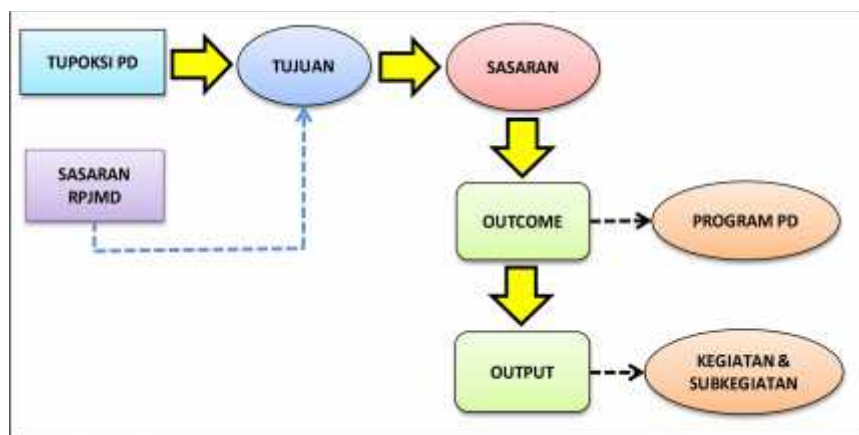
	Pemerataan kompetensi tenaga pendidik	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah tertinggal dan sulit dijangkau, dengan skema rotasi dan insentif berbasis lokasi.	
	Pemenuhan formasi dan insentif guru	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan	Pemenuhan kebutuhan formasi guru dan tenaga kependidikan dengan pengangkatan ASN/PPPK serta dukungan insentif dan fasilitas kerja	

## **BAB 4**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**



#### **4.1 Uraian Program**

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

###### **Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan program strategis yang bertujuan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pendidikan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Melalui penguatan program ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di sektor pendidikan.

**b. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan program utama yang secara langsung mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator-indikator strategis seperti peningkatan angka partisipasi kasar (APK). Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas,

merata, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

## **4.2 Uraian Kegiatan**

Dalam mewujudkan program diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pendidikan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan
  2. Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan
  3. Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan
  4. Administrasi Umum Dinas Pendidikan
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Pendidikan  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  4. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal
- c. Program Pengembangan Kurikulum  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
1. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar
  2. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dasar, paud dan pendidikan non formal/kesetaraan
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
  2. Penerbitan izin paud dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
- f. Program Pengembangan Kebudayaan  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
  2. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
  3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota

- g. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
  - 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
- h. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya  
Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :
  - 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
  - 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

#### **4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, dan transformasi digital. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Berikut adalah tabel teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan renstra PD.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KE T</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membantu sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelestarian budaya	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang merata	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Nilai Rata-Rata Asesmen SD (%)	Nilai Rata-Rata Asesmen SD (%)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Persentase Pendidikan SD Terakreditasi B (%)	Persentase Pendidikan SD Terakreditasi B (%)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik	

						dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
						1.01.02.2.01.002 9 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						1.01.02.2.01.004 3 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						1.01.02.2.01.004 6 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.2.01.004 8 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.01.005 0 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
						1.01.02.2.01.005 5 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Nilai Rata-Rata Assesmen SMP (%)	Nilai Rata-Rata Assesmen SMP (%)	1.01.02.2.02.001 2 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Persentase Pendidikan SMP Terakreditasi B (%)	Persentase Pendidikan SMP Terakreditasi B (%)	1.01.02.2.02.002 4 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

						1.01.02.2.02.002 7 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.2.02.003 0 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.02.003 8 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
						1.01.02.2.02.004 0 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
						1.01.02.2.02.005 5 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						1.01.02.2.02.005 8 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						1.01.02.2.02.006 2 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			Meningkatn ya Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipas i dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatka n minimal akreditasi B (%)	1.01.02.2.03.000 2 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (%)	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (%)	1.01.02.2.03.000 9 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
						1.01.02.2.03.001 6 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
						1.01.02.2.03.001 8 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						1.01.02.2.03.003 4 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
						1.01.02.2.03.003 7 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						1.01.02.2.03.004 1 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.2.03.004 2 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.03.004 5 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						1.01.02.2.03.004 7 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

				(APS) (%)	(APS) (%)		
				Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B (%)	Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B (%)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Persentase Tenaga Pendidik Kesetaraan Berijazah DIV/S1 (%)	Persentase Tenaga Pendidik Kesetaraan Berijazah DIV/S1 (%)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
						1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
						1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
						1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
						1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
						1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
						1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	

						Pendidikan Non Formal	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						1.01.03.2.01.000 2 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
						1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
						1.01.03.2.02.000 2 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04.2.01.000 1 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						1.01.04.2.01.000 2 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	

						Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
						2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
						2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
						2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
						2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	

						2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.22.02.2.03.000 1 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
						2.22.02.2.03.000 2 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
						2.22.02.2.03.000 3 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatn ya pengembang an keseniaan tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangk an (%)	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangk an (%)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.22.03.2.01.000 1 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
						2.22.03.2.01.000 2 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
						2.22.03.2.01.000 3 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatn ya Tata Kelola Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05.2.01.000 3 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
--	--	--	--	--	--	---	--

**TABEL 4.2**  
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				177.067.689.000,00		177.933.277.000,00		178.803.318.000,00		179.677.835.000,00		180.556.849.000,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				135.116.689.000,00		135.755.377.000,00		136.396.479.000,00		137.041.012.000,00		137.688.992.000,00		
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68	70	135.116.689.000,00	72	135.755.377.000,00	73	136.396.479.000,00	74	137.041.012.000,00	75	137.688.992.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				380.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00		
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	380.000.000,00	2	390.000.000,00	2	400.000.000,00	2	410.000.000,00	2	420.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	374.954	374.958		374.960		374.962		374.964		374.966			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00	2	110.000.000,00	2	115.000.000,00	2	120.000.000,00		
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	205.000.000,00	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	374.954	374.958	30.000.000,00	374.960	30.000.000,00	374.962	30.000.000,00	374.964	30.000.000,00	374.966	30.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				133.436.689.000,00		134.040.377.000,00		134.651.479.000,00		135.266.012.000,00		135.888.992.000,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	133.436.689.000,00	12	134.040.377.000,00	12	134.651.479.000,00	12	135.266.012.000,00	12	135.888.992.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				133.086.689.000,00		133.680.377.000,00		134.281.479.000,00		134.886.012.000,00		135.498.992.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	133.086.689.000,00	12	133.680.377.000,00	12	134.281.479.000,00	12	134.886.012.000,00	12	135.498.992.000,00		
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	300.000.000,00	12	310.000.000,00	12	320.000.000,00	12	330.000.000,00	12	340.000.000,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				420.000.000,00		445.000.000,00		465.000.000,00		485.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	420.000.000,00	1	445.000.000,00	1	465.000.000,00	1	485.000.000,00	1	500.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	160.000.000,00	12	170.000.000,00	12	180.000.000,00	12	190.000.000,00		
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		

	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1		
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Meningkatnya Kenyamanan dalam Aktivitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Pemakaian Aset Daerah Siap Pakai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	1		1		1		1		1			

	Pajaknya (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				41.430.000.000,00		41.637.900.000,00		41.846.839.000,00		42.056.823.000,00		42.267.857.000,00		
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	91	95	6.000.000.000,00	95,5	6.100.000.000,00	95,7	6.200.000.000,00	96	6.300.000.000,00	96,5	6.400.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)	53	60		62		63		65		67			
	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV (%)	82	83		83,5		84		85		86			
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				6.000.000.000,00		6.100.000.000,00		6.200.000.000,00		6.300.000.000,00		6.400.000.000,00		
Persentase APS PAUD Formal	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1	6.000.000.000,00	1	6.100.000.000,00	1	6.200.000.000,00	1	6.300.000.000,00	1	6.400.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2	6		8		8		9		9			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	67	67		67		67		67		67			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	230	230		230		230		230		230			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	90	110		120		130		140		150			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	21	21		21		21		21		21			

	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	21	21		21		21		21		21		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	230	230		230		230		230		230		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	230	230		230		230		230		230		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.01.02.2.03.0002 -	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2	6	600.000.000,00	8	800.000.000,00	8	800.000.000,00	9	900.000.000,00	9	900.000.000,00	
1.01.02.2.03.0009 -	Pengadaan Perlengkapan PAUD			200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0011 -	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	90	110	110.000.000,00	120	120.000.000,00	130	130.000.000,00	140	140.000.000,00	150	150.000.000,00	
1.01.02.2.03.0015 -	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	21	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	21	21	70.000.000,00	21	70.000.000,00	21	70.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	230	230	80.000.000,00	230	85.000.000,00	230	90.000.000,00	230	95.000.000,00	230	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				3.805.000.000,00		3.675.000.000,00		3.750.000.000,00		3.715.000.000,00		3.790.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	230	230	3.805.000.000,00	230	3.675.000.000,00	230	3.750.000.000,00	230	3.715.000.000,00	230	3.790.000.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	21	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	67	67	70.000.000,00	67	75.000.000,00	67	80.000.000,00	67	85.000.000,00	67	90.000.000,00		
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	21	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00	21	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	21	21	100.000.000,00	21	100.000.000,00	21	100.000.000,00	21	100.000.000,00	21	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	230	230	70.000.000,00	230	75.000.000,00	230	80.000.000,00	230	85.000.000,00	230	90.000.000,00		
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	96	98	16.000.000.000,00	98,5	16.000.000.000,00	98,7	16.000.000.000,00	99	16.000.000.000,00	99,5	16.000.000.000,00		
	Nilai Rata-Rata Asesmen SD (%)	73	74		75,5		77,5		78,5		79			
	Persentase Pendidikan SD Terakreditasi B (%)	66	67,5		68		69		70		71			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		
Persentase APS SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2	5	15.910.000.000,00	5	15.905.000.000,00	6	15.900.000.000,00	6	15.895.000.000,00	8	15.890.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	115	115		115		115		115		115			

	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	6		6		6		7		8			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	4		4		5		5		6			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	4	5		5		6		6		7			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	2.500	3.100		3.150		3.160		3.170		3.180			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		2		2			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	115	115		115		115		115		115			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	115	115		115		115		115		115			
1.01.02.2.01.0006 -	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	4		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016 -	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00	

Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	315.000.000,00	2	350.000.000,00	2	360.000.000,00		
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Tertindakannya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	4	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	7	350.000.000,00		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	115	115	100.000.000,00	115	105.000.000,00	115	110.000.000,00	115	115.000.000,00	115	120.000.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	115	115	80.000.000,00	115	90.000.000,00	115	95.000.000,00	115	100.000.000,00	115	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	115	115	100.000.000,00	115	105.000.000,00	115	110.000.000,00	115	115.000.000,00	115	120.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
Tertindakannya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	120	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	105.000.000,00	120	110.000.000,00	120	115.000.000,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				13.218.000.000,00		13.166.000.000,00		12.917.000.000,00		12.679.000.000,00		12.390.000.000,00		
Tertindakannya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	120	120	13.218.000.000,00	120	13.166.000.000,00	120	12.917.000.000,00	120	12.679.000.000,00	120	12.390.000.000,00		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				60.000.000,00		63.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		70.000.000,00		

Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	115	115	60.000.000,00	115	63.000.000,00	115	65.000.000,00	115	67.000.000,00	115	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				45.000.000,00		45.000.000,00		46.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	46.000.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	115	115	115.000.000,00	115	115.000.000,00	115	115.000.000,00	115	115.000.000,00	115	115.000.000,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	34.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1	33.000.000,00	1	34.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	115	115	150.000.000,00	115	155.000.000,00	115	160.000.000,00	115	170.000.000,00	115	170.000.000,00		

1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00	6	450.000.000,00	7	600.000.000,00	8	650.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	115	115	65.000.000,00	115	65.000.000,00	115	65.000.000,00	115	70.000.000,00	115	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	2.500	3.100	100.000.000,00	3.150	100.000.000,00	3.160	100.000.000,00	3.170	100.000.000,00	3.180	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	8	350.000.000,00		
Persentase Nilai Assesmen SD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	120	120	90.000.000,00	120	95.000.000,00	120	100.000.000,00	120	105.000.000,00	120	110.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	120	120	90.000.000,00	120	95.000.000,00	120	100.000.000,00	120	105.000.000,00	120	110.000.000,00		
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	62,5	63,5	3.000.000.000,00	64	3.100.000.000,00	64,5	3.200.000.000,00	65	3.300.000.000,00	65,6	3.400.000.000,00		
	Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B (%)	7	8		8,5		9		9,5		10			
	Persentase Tenaga Pendidik Kesetaraan Berijazah DIV/S1 (%)	60	62		63		64		65		66			
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3.000.000.000,00		3.100.000.000,00		3.200.000.000,00		3.300.000.000,00		3.400.000.000,00		
Persentase APS Pendidikan Kesetaraan/Nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	14	14	2.900.000.000,00	14	3.000.000.000,00	14	3.100.000.000,00	14	3.200.000.000,00	14	3.300.000.000,00		

	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	3	4		4		4		5		5			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	14	14		14		14		14		14			

	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	14	14		14		14		14		14			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	14	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	14	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.590.000.000,00		1.690.000.000,00		1.790.000.000,00		1.840.000.000,00		1.940.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	14	14	1.590.000.000,00	14	1.690.000.000,00	14	1.790.000.000,00	14	1.840.000.000,00	14	1.940.000.000,00		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	14	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	14	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00	14	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	14	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	3	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	3	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		

1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	3	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
Persentase ATS	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	30	85	100.000.000,00	88	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	30	85	100.000.000,00	88	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	88,5	90	16.430.000.000,00	90,5	16.437.900.000,00	90,8	16.446.839.000,00	91	16.456.823.000,00	91,5	16.467.857.000,00		
	Nilai Rata-Rata Assesmen SMP (%)	65	67,5		69		71,5		73,5		75			
	Persentase Pendidikan SMP Terakreditasi B (%)	74	76		77		78		80		81			
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			16.430.000.000,00		16.437.900.000,00		16.446.839.000,00		16.456.823.000,00		16.467.857.000,00			
Persentase APS SMP	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	16.330.000.000,00	1	16.332.900.000,00	1	16.336.839.000,00	1	16.341.823.000,00	1	16.347.857.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	35	70		70		70		70		70			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4	6		7		7		8		9			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	4		4		5		6		6			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	120		130		140		145		150			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	3	4		5		5		7		8			

1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				475.000.000,00		480.000.000,00		485.000.000,00		490.000.000,00		500.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	5	475.000.000,00	5	480.000.000,00	5	485.000.000,00	5	490.000.000,00	5	500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				240.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	5	240.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	260.000.000,00	5	270.000.000,00		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				380.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	4	380.000.000,00	4	400.000.000,00	5	420.000.000,00	6	440.000.000,00	6	450.000.000,00		
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	3	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	7	350.000.000,00	8	400.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				146.000.000,00		147.000.000,00		148.000.000,00		149.000.000,00		150.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	120	146.000.000,00	130	147.000.000,00	140	148.000.000,00	145	149.000.000,00	150	150.000.000,00		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	35	70	135.000.000,00	70	140.000.000,00	70	145.000.000,00	70	145.000.000,00	70	150.000.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	35	35	130.000.000,00	35	135.000.000,00	35	140.000.000,00	35	145.000.000,00	35	150.000.000,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	35	35	100.000.000,00	35	105.000.000,00	35	110.000.000,00	35	115.000.000,00	35	120.000.000,00		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35	100.000.000,00	35	110.000.000,00	35	115.000.000,00	35	120.000.000,00	35	125.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				13.652.000.000,00		13.457.900.000,00		13.394.839.000,00		13.172.823.000,00		13.002.857.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	35	35	13.652.000.000,00	35	13.457.900.000,00	35	13.394.839.000,00	35	13.172.823.000,00	35	13.002.857.000,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				62.000.000,00		63.000.000,00		64.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	35	35	62.000.000,00	35	63.000.000,00	35	64.000.000,00	35	65.000.000,00	35	70.000.000,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		

1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	35	35	40.000.000,00	35	45.000.000,00	35	45.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				150.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30	30	150.000.000,00	30	170.000.000,00	30	175.000.000,00	30	180.000.000,00	30	185.000.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4	6	300.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	8	400.000.000,00	9	450.000.000,00		
Persentase Nilai Assesmen SMP	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	35	35	100.000.000,00	35	105.000.000,00	35	110.000.000,00	35	115.000.000,00	35	120.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	35	35	100.000.000,00	35	105.000.000,00	35	110.000.000,00	35	115.000.000,00	35	120.000.000,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				221.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	221.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	260.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				121.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	121.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00		
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				121.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		

Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	1	121.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	110.000.000,00	100	115.000.000,00	100	120.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100		100		100							
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1		1		1							
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		

Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				200.000.000,00		205.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		
Meningkanya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	200.000.000,00	100	205.000.000,00	100	210.000.000,00	100	215.000.000,00	100	220.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		

Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Perizinan PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.050.000.000,00		1.075.000.000,00		1.100.000.000,00		1.125.000.000,00		1.150.000.000,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				600.000.000,00		615.000.000,00		630.000.000,00		645.000.000,00		660.000.000,00		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	100	100	600.000.000,00	100	615.000.000,00	100	630.000.000,00	100	645.000.000,00	100	660.000.000,00	1.01.2.22.0.002.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	11	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	4	5		6		7		8		9			
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2	2		5		7		9		10			
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2	2	50.000.000,00	5	50.000.000,00	7	50.000.000,00	9	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	4	5	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	11	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2	2		5		6		7		8			

	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	10		12		14		16		18		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tertindakannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	50.000.000,00	16	50.000.000,00	18	50.000.000,00	
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tertindakannya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2	2	50.000.000,00	5	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		260.000.000,00	
Meningkatnya Sumber Daya Budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	4	5	200.000.000,00	6	215.000.000,00	7	230.000.000,00	8	245.000.000,00	9	260.000.000,00	
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	10		12		14		16		18		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	1		1		2		3		3		
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tertindakannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	50.000.000,00	16	50.000.000,00	18	50.000.000,00	

2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	4	5	50.000.000,00	6	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00	2	130.000.000,00	3	145.000.000,00	3	160.000.000,00		
<b>2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>		
Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah kelompok/sanggar/pelaku seni budaya terbina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	11	10	150.000.000,00	12	150.000.000,00	14	150.000.000,00	16	150.000.000,00	18	150.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2	2		2		3		3		3			
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2		2		3		3		3			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	11	10	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	50.000.000,00	16	50.000.000,00	18	50.000.000,00		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		

2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	300.000.000,00	100	310.000.000,00	100	320.000.000,00	100	330.000.000,00	100	340.000.000,00	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	60	65	200.000.000,00	66	200.000.000,00	67	200.000.000,00	68	200.000.000,00	69	200.000.000,00		
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	60	65	200.000.000,00	66	200.000.000,00	67	200.000.000,00	68	200.000.000,00	69	200.000.000,00		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	60	65	100.000.000,00	66	110.000.000,00	67	120.000.000,00	68	130.000.000,00	69	140.000.000,00		
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	60	65	100.000.000,00	66	110.000.000,00	67	120.000.000,00	68	130.000.000,00	69	140.000.000,00		

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, akses pendidikan, penguatan karakter, dan literasi peserta didik. Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

**TABEL 4.3**  
**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

		1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
		1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
		1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
		1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
		1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
		1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
		1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
		1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
		1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
		1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
		1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
		1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

			1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
2.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
4.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0004 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
5.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	

			2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
6.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Tata Kelola Cagar Budaya	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	

Tabel 4.3 menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor pendidikan. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam menjawab isu-isu utama seperti kesejahteraan guru, pendidikan karakter, akses pendidikan bagi siswa rentan, serta peningkatan literasi dan numerasi. Misalnya, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya berdampak pada kelangsungan proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru. Sementara itu, pembinaan kelembagaan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa dan pemberian beasiswa mendorong partisipasi pendidikan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum dalam tabel menunjukkan pendekatan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan riil pendidikan di daerah. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah pembangunan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sosial, ekonomi, dan karakter. Dengan demikian, Tabel 4.3 menegaskan pentingnya perencanaan subkegiatan yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil untuk memastikan bahwa program-program pendidikan benar-benar mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi

eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu strategis pendidikan, seperti peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan. Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 4.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.2.22.0.00.02.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
2.	Skor Literasi/Numerasi	Skor	67,75	68,25	69,75	70,75	72,25	74,50	76	
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,66	13,90	13,97	14,05	14,07	14,13	14,14	
4.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,42	9,60	9,78	9,96	10,14	10,32	10,50	
5.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	36,76	57,56	67,96	58,96	61,76	66,56	70,76	
6.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66	68	70	72	73	74	75	
7.	Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	300	350	400	450	500	550	600	
8.	Angka Literasi SD	%	60,36	71,87	73	75	77	78	80	
9.	Penetapan Cagar Budaya	Angka	2	3	3	5	7	9	10	
10.	Angka Numerasi SD	%	55,96	74,28	75	76	78	79	81	
11.	Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI)	Angka	1	2	2	5	7	9	10	
12.	Angka Literasi SMP	%	66,68	67,79	68	70	72	74	75	
13.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Angka	240	245	250	255	260	265	270	
14.	Angka Numerasi SMP	%	61,09	65,10	67	68	71	73	75	
15.	Iklim Keamanan SD	Nilai	90,75	91	92,75	93	93,5	94	95	
16.	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	90,75	91	92,75	93	93,5	93,75	94	
17.	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	89,5	90	90,75	91	91,5	92	93	

18.	Iklm Keamanan SMP	Nilai	86,5	87	87,5	90	90,5	91	92	
19.	Iklm Kebinekaan SMP	Nilai	81	81,5	82	85	87	88	90	
20.	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	86	87	87,5	90	91	91,5	92	

#### **4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pendidikan dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

**TABEL 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Angka Literasi SD	positif	%	60,36	71,87	73	75	77	78	80	
3.	Angka Numerasi SD	positif	%	55,96	74,28	75	76	78	79	81	
4.	Angka Literasi SMP	positif	%	66,68	67,79	68	70	72	74	75	
5.	Angka Numerasi SMP	positif	%	61,09	65,10	67	68	71	73	75	
6.	Iklim Keamanan SD	positif	Nilai	90,75	91	92,75	93	93,5	94	95	
7.	Iklim Kebhinekaan SD	positif	Nilai	90,75	91	92,75	93	93,5	93,75	94	
8.	Iklim Inklusivitas SD	positif	Nilai	89,5	90	90,75	91	91,5	92	93	
9.	Iklim Keamanan SMP	positif	Nilai	86,5	87	87,5	90	90,5	91	92	
10.	Iklim Kebinekaan SMP	positif	Nilai	81	81,5	82	85	87	88	90	
11.	Iklim Inklusivitas SMP	positif	Nilai	86	87	87,5	90	91	91,5	92	
12.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	positif	%	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,6	
13.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	positif	%	91	92	95	95,5	95,7	96	96,5	
14.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	96	97	98	98,5	98,7	99	99,5	
15.	Persentase Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi B	positif	%	7	7,6	8	8,5	9	9,5	10	

16.	Nilai Rata-Rata Assesmen SMP	positif	%	65	66,4	67,5	69	71,5	73,5	75	
17.	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	positif	%	53	56	60	62	63	65	67	
18.	Nilai Rata-Rata Assesmen SD	positif	%	73	73,6	74	75,5	77,5	78,5	79	
19.	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	positif	%	82	82,5	83	83,5	84	85	86	
20.	Persentase Pendidikan SD Terakreditasi B	positif	%	66	67	67,5	68	69	70	71	
21.	Persentase Pendidikan SMP Terakreditasi B	positif	%	74	75	76	77	78	80	81	
22.	Persentase Tenaga Pendidik Kesetaraan Berijazah DIV/S1	positif	%	60	61	62	63	64	65	66	
23.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
24.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
25.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang pendidikan, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

#### **5.1 Kesimpulan Substansi**

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan dalam kurun waktu berjalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan pendidikan harus berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan.

3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lainnya, dunia usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat, menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas**

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.

### **2. Partisipatif**

Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

### **3. Efisiensi dan Efektivitas**

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.

#### 4. Keadilan Sosial

Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.

#### 5. Berkelanjutan

Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.

### **5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

#### 1. Monitoring

Berkala Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.

## 2. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.

## 4. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan pendidikan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Dinas Pendidikan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 2025  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**Lusi Wijaya, M.Pd**  
NIP.197403252005011001